



## Jurnalistik bagi Aparatur Pemkot Jogja

Oleh : Y.B. Margantoro

UNTUK kesekian kali Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah, menyelenggarakan workshop bertajuk *Peran Jurnalistik bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta*.

Workshop ini diikuti sebanyak 120 orang terdiri atas pejabat struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta unsur pers. Acara dilaksanakan di Hotel Edotel (SMK N 6), Jalan Kenari No 4 Yogyakarta, Selasa dan Rabu (6 dan 7 Desember 2011).

Kegiatan ini antara lain dilatarbelakangi bahwa upaya peningkatan peran jurnalistik pemerintah daerah perlu dilakukan baik secara internal di lingkungan pemerintah daerah maupun secara eksternal dengan media massa dan masyarakat, dengan harapan mampu membangkitkan kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Berkaitan dengan hal ini, perlu dipahami bersama dulu bahwa pengertian jurnalistik di sini adalah pers dan atau media, bukan jurnalistik sebagai "ilmu kewartawanan" atau "ilmu ke-massmediaan". Dengan demikian ada beberapa hal penting di sini yakni pers, pemerintah, dan masyarakat. Dinamika yang diharapkan terjadi dalam hubungan ketiganya adalah "pembangunan" yang berjalan dengan benar, baik dan bermanfaat bagi

dihatirkan

1. W
2. W
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten .....

**Peranan koran daerah**  
Sesuai dengan topik workshop ini *Peran Jurnalistik bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta* adalah bicara tentang peranan (wartawan) koran daerah bagi daerah bersangkutan dalam hal ini Yogyakarta.

Redaktur Pelaksana *Daily News-Record* di Harrisonburg, Virginia, Amerika Serikat Kenk Mink mengemukakan, surat kabar lokal atau *community newspaper* hendaknya berusaha agar masyarakat merasa seperti menjadi bagian dalam berita. Demikian pula sebaliknya, hendaknya diusahakan agar surat kabar menjadi bagian dari masyarakat.

Apa makna (menjadi) wartawan lokal atau daerah? Menurut Hanif Suranto dan Dicky Lopulalan dalam YBM (2011), bekerja di surat kabar dengan tugas utama meliput berbagai peristiwa atau pandangan di tingkat lokal, maka kita disebut wartawan lokal.

Makna lainnya, adanya surat kabar nasional, stasiun televisi penyiaran nasional, stasiun radio penyiaran nasional, atau kantor berita nasional biasanya memiliki sejumlah koresponden daerah. Merekalah yang bertanggungjawab melaporkan berbagai peristiwa atau pandangan dari wilayah liputannya. Koresponden daerah ini kita sebut juga wartawan lokal.

Jadi wartawan lokal adalah wartawan yang bekerja pada sebuah media massa dengan tugas utama melapor-

kan berita atau pandangan dari wilayah liputannya, biasanya wilayah tingkat provinsi atau kota/kabupaten.

Pada masa milenium ketiga ini, peranan atau tugas sosial wartawan lokal kiranya menjadi semakin penting. Mengapa? Dengan adanya otonomi daerah, wartawan lokal/daerah diminta atau tidak diminta harus memberikan andil di daerah bersangkutan. Ketentuan mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Tugas atau peran sosial wartawan lokal sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain adalah memonitor dan mengevaluasi, penyambung lidah rakyat, serta memberi motivasi.

Karakteristik atau sifat dasar yang diharapkan dari wartawan lokal adalah bersikap kritis, memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpengetahuan luas, berpikiran terbuka, dan menjadi pekerja

penting, sebab wartawan akan bekerja bersama masyarakat. Pemahaman terhadap hal-hal itu akan sangat membantu keberhasilan kerja wartawan surat kabar lokal.

Selanjutnya menghimpun dan menggalang hubungan seluas-luasnya dengan pejabat pemerintahan setempat, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat bawah, akan sangat membantu tugas wartawan lokal. Dalam hal ini, mulai dari walikota/bupati, tokoh-tokoh partai lokal, anggota-anggota DPRD, anggota kepolisan, pedagang besar, pedagang kecil, sampai petani. Mereka akan dapat membantu wartawan mendapatkan informasi dengan lebih mudah.

**Keperawatan bersama**

Jakob Octama (1987) mengemukakan, hubungan pers dan pemerintah adalah hubungan yang dibawa oleh kepentingan bersama untuk menyampaikan dan menerima pesan, untuk menyampaikan dan menerima kontrol sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada kepentingan rakyat banyak.

Jadi wartawan lokal adalah wartawan yang bekerja pada sebuah media massa dengan tugas utama melaporkan berita atau pandangan dari wilayah liputannya, biasanya wilayah tingkat provinsi atau kota/kabupaten.

keras. Selain itu, juga perlu memiliki dan memahami aspek komitmen, memahami persoalan masyarakatnya, memahami kebijakan pemerintah, memahami kultur masyarakatnya, menggalang hubungan luas.

Komitmen di sini dimaksudkan memiliki kepedulian dan ikut bertanggungjawab terhadap perbaikan segala segi kehidupan masyarakat di daerahnya.

Berbagai masalah masyarakat di daerahnya juga harus dapat dipahami wartawan lokal. Ini menyangkut persoalan yang dihadapi masyarakat setempat, harapan-harapan mereka, kendala-kendala yang mereka hadapi, serta potensi-potensi yang mereka miliki akan sangat membantu kerja jurnalistik wartawan lokal.

Kemudian dengan memahami kebijakan pembangunan di tingkat lokal, wartawan daerah bisa mensosialisasikannya kepada masyarakat. Apakah kebijakan itu sudah tepat atau belum lagi kepentingan masyarakat. Wartawan lokal juga bisa turut mengontrol apakah kebijakan tersebut dilaksanakan atau tidak.

Adat istiadat, kebiasaan, bahasa, dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat di wilayahnya, juga harus dapat dipahami wartawan lokal. Ini

Perangkat pemerintah sejak dulu menjadi keharusan bagi masyarakat. Perangkat pers menjadi keharusan untuk masyarakat zaman sekarang dan seterusnya.

Hubungan itu berada dalam semangat kerja sama, semangat seiring, semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Kebersamaan itu tidak meniadakan atau mengurangi posisi dan peranan masing-masing. Peranan masing-masing itu, di samping menjadi sumber kreativitas dan saling merangsang, juga menjadi sumber salah paham, perbedaan cara melihat persoalan, ketegangan. Hal itu di satu pihak harus diterima sebagai keadaan yang tidak terhindarkan; sebaliknya, senantiasa dicarikan jalan keluar melalui dialog dan lain-lain.

Interaksi positif bukanlah untuk meniadakan atau melemahkan peranan kontrol dan koreksi pers. Interaksi itu mempengaruhi bagaimana kontrol dan koreksi itu dilakukan serta pada prosesi yang bagaimana. Arah interaksi haruslah tidak membatasi, tetapi semakin meluaskan, sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Seiring dengan tuntutan membangun image positif pemerintah daerah sehingga mampu menumbuhkan

kepercayaan masyarakat dan akhirnya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan memajukan daerahnya menjadi tantangan bagi aparat hubungan masyarakat (humas), maka perlu adanya kompetensi jurnalistik bagi aparat pemerintah daerah.

Secara internal, Pemerintah Kota Yogyakarta paling tidak memiliki dua media cetak internal yakni Majalah *Avotiv* dan Tabloid *Media Info Kota* yang ditangani oleh Bagian Humas dan Informasi. Aparat pemerintah kota bersama pengasuh kedua media tersebut kiranya dapat bersama-sama mengisi materi tulisan fakta, opini, foto atau kiriman lainnya. Sedangkan secara eksternal, aparat pemerintah kota juga dapat menulis untuk media massa, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki.

Kerangka berpikir dan langkah para wartawan kota dan wartawan kampung di Kota Yogyakarta sebaiknya mengacu ke visi dan misi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2005 - 2025. Visinya adalah : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan.

Sedangkan misinya adalah : 1) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan; 2) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan; 3) Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa; 4) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan.

Kemudian misi ke 5) Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretik, beradab dan berbudaya; 6) Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan, demokratis yang berlandaskan hukum; 7) Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai; 8) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas; 9) Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

Adanya slogan **SEGORO AMAR-TO** yakni *semangat gotong royong agawe majune Ngayogyakarta* melalui kemandirian, kedisiplinan, kepedulian dan kebersamaan, juga dapat dijadikan inspirasi dan motivasi dalam karya tulisan jurnalistik maupun non jurnalistik.

Pada akhirnya, aparat Humas khususnya dan aparat pemerintah Kota Yogyakarta umumnya paling tidak perlu menguasai empat jenis ketrampilan dasar dalam berkomunikasi yaitu: menulis, membaca (bahasa tulisan), mendengar dan berbicara (bahasa lisan). \*\*\*

**Y.B. Margantoro**, Wartawan Harian *BERNAS JOGJA* dan Direktur *Leuboga Pelatihan Jurnalistik Bernas Jogja (LPJB)*.

| Instansi                      | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|-------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Bagian Humas dan Informasi | Positif      | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 08 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005